E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 2357-2372
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

# Analisis Konseptual Evaluasi Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kota Pekanbaru Berbasis Logic Model dan Implementation Gap

**Siti Martuti[1], Rianti Agustriani[2], Mai Yora Debby Silvia[3], Rendi Prayuda[4]**

Program Studi Ilmu Administrasi, Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru
E-mail: martutisiti1@gmail.com[1], agustrianirianti10@gmail.com[2], maiyoradebbys@gmail.com[3], rendiprayuda@soc.uir.ac.id[4]

**Abstrak**

Partisipasi pemilih yang rendah sering mendorong penyelenggara pemilu memperbanyak kegiatan sosialisasi, tetapi keberhasilan program umumnya dilaporkan melalui jumlah kegiatan, peserta, dan serapan anggaran, bukan melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pemilih. Artikel ini merupakan analisis konseptual-deskriptif berbasis dokumen sekunder yang bertujuan merumuskan kerangka evaluasi, memetakan logika Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kota Pekanbaru, mengidentifikasi risiko kesenjangan implementasi (implementation gap), menyusun indikator output dan outcome beserta instrumen pengukurannya, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Kerangka analisis menggunakan logic model serta teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, Edwards III, dan Grindle. Data partisipasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 (46,12%; 364.819 dari 791.034 pemilih terdaftar) dipakai sebagai konteks dan baseline, diperkuat dengan penelusuran penelitian terdahulu. Hasil kajian mengidentifikasi lima sumber risiko kesenjangan: orientasi pada capaian kegiatan, komunikasi yang kurang interaktif, penetapan sasaran yang belum berbasis data, pelaksanaan musiman, dan ketiadaan pengukuran pre-post. Artikel ini mengusulkan empat indikator evaluasi beserta contoh instrumen tes. Sebagai studi konseptual, temuan ini berfungsi sebagai kerangka kerja hipotetis dan panduan metodologis bagi KPU maupun peneliti selanjutnya untuk melakukan verifikasi empiris di lapangan melalui wawancara, observasi, dan survei pre-post.

**Kata kunci:** *pendidikan pemilih; evaluasi program; logic model; implementation gap; KPU Kota Pekanbaru; partisipasi pemilih*

**Abstract**

Low voter turnout often prompts election management bodies to expand voter outreach, yet program success is usually reported through the number of activities, participants, and budget absorption rather than changes in voters' knowledge, attitudes, and behavior.

This article is a conceptual-descriptive analysis based on secondary documents aimed at developing an evaluation framework, mapping the program logic of the Voter Education and Outreach Program of the Pekanbaru City Election Commission (KPU), identifying implementation gap risks, developing output and outcome indicators along with measurement instruments, and formulating improvement recommendations. The analytical framework uses the logic model and the policy implementation theories of Van Meter and Van Horn, Edwards III, and Grindle. Turnout in the 2024 Pekanbaru mayoral election (46.12%; 364,819 of 791,034 registered voters) serves as context and baseline, supported by a review of earlier studies. Five sources of risk widen the gap between outputs and outcomes: an orientation toward activity targets, one-way communication, targeting that is not yet data-based, seasonal implementation, and the absence of pre- and post-activity measurement. The article proposes four evaluation indicators and sample test instruments. As a conceptual study, these findings serve as a hypothetical framework and methodological guide for the KPU and future researchers to conduct empirical verification in the field through interviews, observation, and pre-post surveys.

**Keywords:** *voter education; program evaluation; logic model; implementation gap; Pekanbaru KPU; voter turnout*

## LATAR BELAKANG

Pemilu yang demokratis tidak hanya diukur dari kelancaran teknis penyelenggaraannya, tetapi juga dari kualitas keterlibatan warga. Pemilih perlu memahami hak pilih, mengenali tahapan pemilu, menyaring informasi, dan mengambil keputusan secara mandiri serta bertanggung jawab. Karena itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi bagian penting dari tugas penyelenggara pemilu. Mandat kegiatan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Tantangan evaluasi muncul ketika keberhasilan program lebih mudah dilaporkan melalui jumlah kegiatan, peserta, dan serapan anggaran, sementara perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pemilih tidak diukur secara memadai. Kesenjangan antara kegiatan yang terlaksana dan hasil yang benar-benar dialami penerima manfaat dapat dipahami sebagai risiko implementation gap (Pressman & Wildavsky, 1973).

Konteks Kota Pekanbaru memperlihatkan relevansi persoalan ini. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024, tercatat 364.819 dari 791.034 pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih, atau 46,12%. Angka ini lebih rendah daripada partisipasi Pilwako Pekanbaru 2017 yang dilaporkan sebesar 51,9%, dan jauh di bawah target KPU RI sebesar 77,5% pada saat itu (Andriani, t.t.). Secara lebih luas, KPU menyatakan rata-rata partisipasi Pilkada 2024 secara nasional turun hingga di bawah 70% (Bisnis.com, 2024), sementara partisipasi Pilgub Riau 2024 dilaporkan sekitar 60% atau lebih rendah daripada pemilu legislatif sebelumnya (InfoPublik, 2024). Partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru juga dilaporkan menurun dari 66,5% pada 2019 menjadi 53,6% pada 2024 (Maulana, 2025). Rangkaian data ini memperkuat alasan

untuk mengkaji kebutuhan evaluasi program, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat partisipasi.

Penelitian terdahulu tentang KPU Kota Pekanbaru sebagian besar menilai peran dan strategi lembaga dalam meningkatkan partisipasi, misalnya pada kelompok pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat umum (Lestari, 2026; Maulana, 2025; Abda, 2025), serta pelaksanaan program relawan demokrasi basis perempuan (Hambali et al., 2020). Studi-studi tersebut menggambarkan upaya yang telah dilakukan beserta hambatannya. Di daerah lain, evaluasi sosialisasi KPU cenderung menilai efisiensi dengan membandingkan sumber daya yang dipakai dan angka partisipasi yang dicapai (Marshalena et al., 2025). Evaluasi yang secara eksplisit memisahkan kinerja output dan outcome, seperti pada program desa melek politik KPU Kabupaten Sleman (Sunarsih, 2018), jarang ditemukan dalam penelusuran penulis. Kajian yang menempatkan program pendidikan pemilih KPU Kota Pekanbaru dalam kerangka logic model dan menguji rantai antara output dan outcome secara eksplisit masih terbatas. Di situlah artikel ini berkontribusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disederhanakan menjadi dua fokus utama: (1) Bagaimana kerangka logic model dan risiko implementation gap pada Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kota Pekanbaru? (2) Bagaimana formulasi indikator output-outcome, instrumen pengukuran, serta rekomendasi perbaikan yang relevan bagi pengembangan program?

Artikel ini bertujuan memetakan logika program, mengidentifikasi risiko kesenjangan implementasi, menyusun indikator output dan outcome beserta instrumen pengukurannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Secara akademik, artikel ini memberikan kontribusi konseptual mengenai penerapan logic model dan teori implementasi kebijakan dalam merancang kerangka evaluasi program tingkat kota. Secara praktis, kerangka ini menjadi panduan metodologis bagi KPU Kota Pekanbaru, dengan catatan tetap memerlukan verifikasi empiris dan pengujian data lapangan.

## Tinjauan Pustaka

### Pendidikan Pemilih dan Kualitas Partisipasi

Pendidikan pemilih adalah upaya terencana untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan warga agar menggunakan hak pilih secara mandiri dan bertanggung jawab. Sosialisasi umumnya berfokus pada penyampaian informasi, sedangkan pendidikan pemilih idealnya juga mendorong pemahaman dan sikap kritis. Dengan demikian, banyaknya kegiatan penyebaran informasi belum otomatis menunjukkan peningkatan kualitas partisipasi.

Partisipasi juga tidak semata-mata kehadiran di tempat pemungutan suara. Kualitas partisipasi mencakup kemampuan memutuskan secara mandiri, memeriksa informasi, serta menghindari pengaruh informasi palsu dan politik uang. Suara tidak sah menjadi salah satu penanda kualitas yang relevan. Kajian KPU di Riau menafsirkan pola pencoblosan ganda dan surat suara kosong sebagai indikasi kurangnya pemahaman pemilih (Jurnal KPU, t.t.). Evaluasi karenanya perlu menguji perubahan pengetahuan dan kesiapan pemilih, bukan hanya menghitung peserta.

Literatur internasional memberi dua petunjuk yang relevan. Pertama, pengetahuan kewargaan dipengaruhi oleh materi dan pengalaman belajar yang diterima, bukan semata karakteristik latar belakang peserta (Niemi & Junn, 1998). Kedua, bentuk kontak memengaruhi hasil. Dalam eksperimen lapangan Gerber dan Green (2000), kontak personal tatap muka lebih berpengaruh terhadap partisipasi daripada pesan massal yang tidak personal. Konteks kedua studi tersebut adalah Amerika Serikat sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi langsung ke Indonesia, tetapi keduanya mendukung gagasan bahwa mutu penyampaian lebih penting daripada jumlah kegiatan.

**Evaluasi Program dan Logic Model**

Logic model menggambarkan hubungan logis antara masalah, tujuan, sumber daya (input), aktivitas, keluaran langsung (output), dan hasil (outcome). W.K. Kellogg Foundation (2004) serta Funnell dan Rogers (2011) menekankan pentingnya menjelaskan asumsi yang menghubungkan aktivitas dengan hasil, sejalan dengan pandangan Weiss (1998) tentang teori program dan dengan pemahaman evaluasi sebagai penilaian atas teori program, pelaksanaan, dan hasil (Rossi et al., 2004). Dalam pendidikan pemilih, kegiatan sosialisasi diharapkan meningkatkan pengetahuan, lalu mendukung kesiapan dan partisipasi. Rantai ini perlu diuji, bukan hanya diasumsikan.

Output adalah produk langsung kegiatan, seperti jumlah sosialisasi dan jumlah peserta. Outcome adalah perubahan pada penerima manfaat, seperti peningkatan pengetahuan, sikap, atau perilaku. Program dapat mencapai output tinggi tanpa menunjukkan outcome yang diharapkan, dan itulah alasan kedua jenis indikator perlu dipisahkan. Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006) membedakan empat tingkat evaluasi, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Tingkat pembelajaran lazim diukur dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, dan inilah dasar bagi pengukuran pre-post yang diusulkan dalam artikel ini.

**Teori Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Edwards III (1980) menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Grindle (1980) membedakan isi kebijakan dan konteks implementasi, termasuk kepentingan kelompok terdampak dan kapasitas pelaksana. Ketiga kerangka ini dipakai sebagai lensa untuk membaca risiko kesenjangan antara rencana dan hasil.

**Penelitian Terdahulu**

Tabel 1 merangkum delapan penelitian terdahulu yang relevan, baik dari Pekanbaru maupun daerah lain. Tiga pola dapat dibaca dari rangkuman tersebut. Pertama, sebagian besar studi menilai peran dan strategi KPU serta melaporkan kegiatan yang telah dilakukan. Kedua, hambatan yang berulang berkaitan dengan penetapan sasaran, kapasitas pelaksana, durasi kegiatan, dan jangkauan. Ketiga, di antara studi yang ditelaah, pengukuran perubahan pengetahuan peserta hampir tidak ditemukan; pengecualian yang paling dekat adalah evaluasi yang memisahkan kinerja output dan outcome pada program desa melek politik di Sleman (Sunarsih, 2018).

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| Peneliti (tahun) | Konteks dan pendekatan | Temuan utama | Relevansi dan celah |
|---|---|---|---|
| Hambali et al. (2020) | Program relawan demokrasi basis perempuan, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (Pemilu 2019); kualitatif deskriptif | Relawan belum tentu aktif di komunitas sasaran; pembekalan dilakukan sekali; tidak ada materi khusus segmen; sekitar 15 kegiatan dalam kurang lebih dua bulan; evaluasi berbasis laporan kegiatan dan angka partisipasi | Sasaran, kapasitas pelaksana, dan durasi; perubahan pengetahuan belum diukur |
| Lestari (2026) | Peran KPU Kota Pekanbaru pada Pilwako 2024, Kecamatan Payung Sekaki; wawancara, observasi, dokumentasi | KPU dinilai telah menjalankan peran; diperlukan peningkatan kualitas dan jangkauan sosialisasi, penguatan pendidikan politik, dan kerja sama | Penilaian berbasis peran; belum ada ukuran hasil |
| Maulana (2025) | Pemilih pemula di SMKN 6 Pekanbaru, Pileg dan Pilpres 2024 | Partisipasi pemilih pemula turun dari 66,5% (2019) menjadi 53,6% (2024); upaya KPU antara lain KPU Goes to School, kerja sama dengan Kesbangpol, dan Rumah Pintar Pemilu | Upaya tercatat; pengaruhnya terhadap pengetahuan belum diuji |
| Abda (2025) | Penyandang disabilitas, Kota Pekanbaru, Pemilu 2024 | Partisipasi disabilitas dilaporkan 73% pada 2024 dibanding 33% pada 2019 | Kenaikan angka belum menunjukkan kontribusi program; angka perlu diverifikasi |
| Marshalena et al. (2025) | Sosialisasi KPU Kabupaten Sidoarjo, Pilkada 2024; kualitatif deskriptif | 24 kegiatan pada Agustus sampai November 2024 melibatkan 25 lembaga; partisipasi 70%, turun dari 71,07% | Efisiensi dinilai dari rasio input dan angka partisipasi; pemahaman |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (2020); penyebab antara lain kelelahan pemilih, rendahnya kepercayaan, dan kurangnya segmentasi | peserta tidak diukur |
| Sunarsih (2018) | Program pilot project desa melek politik, KPU Kabupaten Sleman; tesis | Menganalisis implementasi, kinerja output dan outcome, serta faktor yang memengaruhi implementasi; melibatkan masyarakat sipil sebagai agen sosialisasi | Contoh evaluasi yang memisahkan output dan outcome |
| Moad & Yeswanto (2018) | Pendidikan politik pemilih pemula oleh KPU Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat | Program terstruktur dengan tujuan, materi, metode, dan narasumber yang dirancang; disampaikan komisioner secara tatap muka | Menggambarkan pelaksanaan, bukan hasil |
| Sari et al. (2025) | Strategi KPU meningkatkan partisipasi dan mengurangi golput pada pilkada; kajian literatur dan dokumen | Merumuskan pendidikan pemilih yang tersegmentasi dan berkelanjutan serta kolaborasi berbasis evaluasi terukur | Mendukung segmentasi, keberlanjutan, dan evaluasi terukur |

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain kajian konseptual berbasis dokumen sekunder. Sumber data meliputi (a) peraturan, yakni UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 9 Tahun 2022; (b) data hasil rekapitulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 yang bersumber dari KPU Kota Pekanbaru; (c) literatur teori evaluasi dan implementasi kebijakan; serta (d) penelitian terdahulu dan pemberitaan yang relevan tentang partisipasi pemilih dan sosialisasi KPU di Pekanbaru, Riau, dan daerah lain.

Penelitian terdahulu ditelusuri melalui repositori perguruan tinggi, portal jurnal, dan prosiding dengan kriteria relevansi terhadap pendidikan pemilih atau sosialisasi KPU dan partisipasi pemilih. Penelusuran ini bersifat purposif dan tidak dimaksudkan sebagai tinjauan sistematis. Analisis dilakukan dalam lima langkah: memetakan komponen program ke dalam logic model, menelusuri asumsi perubahan,

mengidentifikasi risiko kesenjangan implementasi dengan kerangka tiga teori, membandingkan risiko tersebut dengan temuan penelitian terdahulu secara tematik, dan merumuskan indikator, instrumen, serta rekomendasi.

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan. Oleh karena itu, risiko yang dirumuskan merupakan hasil analisis konseptual, bukan temuan empiris yang telah dibuktikan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Partisipasi Pemilih sebagai Konteks dan Baseline

**Tabel 2. Partisipasi pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024**

| Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Daftar pemilih tetap | 389.473 | 401.561 | 791.034 |
| Pengguna hak pilih | 164.720 | 200.099 | 364.819 |
| Tingkat partisipasi | 42,29% | 49,83% | 46,12% |
| Tidak menggunakan hak pilih | 224.753 | 201.462 | 426.215 |
| Persentase tidak menggunakan hak pilih | 57,71% | 50,17% | 53,88% |

Partisipasi perempuan lebih tinggi 7,54 poin persentase dibanding laki-laki. Perbedaan ini dapat menjadi petunjuk awal dalam menentukan fokus evaluasi, tetapi penyebabnya perlu diteliti lebih lanjut.

**Tabel 3. Data pembanding partisipasi pemilih**

| Konteks | Angka | Sumber |
|---|---|---|
| Pilwako Pekanbaru 2017 | 51,9% (target KPU RI 77,5%) | Andriani (t.t.) |
| Pilwako Pekanbaru 2024 | 46,12% | Tabel 2 |
| Pemilih pemula Pekanbaru, pemilu 2019 dan 2024 | 66,5% menjadi 53,6% (target nasional 76%) | Maulana (2025) |
| Pilgub Riau 2024 | sekitar 60% | InfoPublik (2024) |
| Rata-rata nasional Pilkada 2024 | di bawah 70% | Bisnis.com (2024) |
| Pilkada Sidoarjo 2024 (pembanding daerah lain) | 70% (2020: 71,07%) | Marshalena et al. (2025) |

Berdasarkan perhitungan penulis, partisipasi Pilwako Pekanbaru turun sekitar 5,8 poin persentase antara 2017 dan 2024. Pada Pilgub Riau 2024, suara tidak sah tercatat 119.475 dari 2.882.476 suara masuk, atau sekitar 4,14% (perhitungan penulis dari data InfoPublik, 2024). Angka suara tidak sah tingkat Kota Pekanbaru untuk Pilwako 2024 belum tersedia dalam dokumen yang dikaji dan perlu dilengkapi dari rekapitulasi resmi KPU.

Penurunan di Pekanbaru searah dengan tren nasional, sehingga faktor di luar program sosialisasi, seperti dinamika kontestasi, jadwal pemilihan yang berdekatan dengan pemilu legislatif dan presiden, serta faktor teknis pemungutan suara,

kemungkinan ikut berperan. Di Sidoarjo, kelelahan pemilih (voter fatigue) dan rendahnya kepercayaan publik disebut sebagai penyebab penurunan partisipasi meskipun sosialisasi telah dilakukan (Marshalena et al., 2025). Pada kasus daerah lain, KPU setempat bahkan menyebut penyatuan TPS sebagai salah satu faktor yang membuat pemilih enggan hadir (ANTARA, 2024). Data agregat ini karenanya memperkuat relevansi evaluasi, tetapi tidak dapat dipakai sebagai bukti tunggal bahwa sosialisasi tidak efektif.

**Tabel 4. Logic model Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kota Pekanbaru**

| Komponen | Pemetaan program |
|---|---|
| Problem | Pengetahuan dan partisipasi pemilih belum optimal dan merata; literasi informasi pemilu dan kemampuan menghadapi hoaks dapat berbeda antarkelompok. |
| Objective | Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pemilih yang rasional, mandiri, serta bertanggung jawab. |
| Input | Anggaran, komisioner dan sekretariat, relawan demokrasi, materi edukasi, serta jejaring mitra (kampus, sekolah, organisasi masyarakat, komunitas, media). |
| Activities | Sosialisasi tatap muka di sekolah dan kampus, kegiatan komunitas, penyebaran informasi lewat media sosial dan siaran, konten kreatif, serta kerja sama dengan mitra. |
| Output | Jumlah kegiatan terlaksana, jumlah peserta per segmen, jumlah konten, dan jumlah mitra yang terlibat. |
| Outcome | Perubahan pengetahuan dan sikap jangka pendek; kesiapan dan partisipasi pemilih jangka menengah. |

Logic model ini memuat asumsi perubahan: sosialisasi memberi informasi, informasi meningkatkan pengetahuan, dan pengetahuan mendukung kesiapan berpartisipasi. Asumsi ini tidak selalu berlaku otomatis. Hasilnya dipengaruhi kualitas materi, metode penyampaian, akses kelompok sasaran, kepercayaan terhadap informasi, serta kondisi sosial dan politik. Temuan penelitian terdahulu menegaskan hal ini. Sosialisasi KPU Pekanbaru pada pemilih pemula 2017 dilaporkan tidak merata karena keterbatasan waktu dan biaya (Repositori UIN Suska, t.t.), dan upaya terhadap pemilih disabilitas pada 2019 dinilai belum optimal karena berbagai hambatan (Purba, 2023). Sebaliknya, kajian pada Pilwako 2024 di Kecamatan Payung Sekaki menyimpulkan bahwa KPU telah menjalankan peran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, pemutakhiran data, dan penyebarluasan informasi, dengan catatan perlunya peningkatan kualitas dan jangkauan (Lestari, 2026). Perbedaan simpulan ini menunjukkan bahwa penilaian berbasis peran dan kegiatan perlu dilengkapi pengukuran hasil.

Kasus penyandang disabilitas memperlihatkan perlunya kehati-hatian. Partisipasi kelompok ini di Kota Pekanbaru dilaporkan naik dari 33% pada 2019 menjadi 73% pada 2024 (Abda, 2025). Kenaikan tersebut menarik, tetapi belum menunjukkan

seberapa besar kontribusi program pendidikan pemilih dibanding faktor lain, seperti perbaikan layanan pemungutan suara. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah data pemilih disabilitas Pekanbaru 2024 antar-literatur, yakni 5.416 pemilih pada Nabil (2025) dan 1.559 pemilih pada Abda (2025). Perbedaan ini terjadi karena variasi cakupan basis data; angka 1.559 pemilih merujuk pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) resmi, sedangkan angka yang lebih tinggi mencakup estimasi potensi pemilih disabilitas pra-pemutakhiran atau gabungan DPTb/DPK. Hal ini menegaskan pentingnya konsolidasi dan verifikasi data sasaran terhadap rekapitulasi resmi KPU sebelum dipakai sebagai baseline evaluasi.

**Risiko Implementation Gap**

Risiko utama adalah kesenjangan antara output dan outcome: kegiatan terlaksana dan peserta tercatat, tetapi belum ada bukti memadai tentang perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku. Risiko ini merupakan hasil analisis konseptual, bukan temuan lapangan. Lima sumber risiko diidentifikasi dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu (Tabel 5).

**Tabel 5. Risiko Implementation Gap**

| Risiko | Lensa teori | Dukungan penelitian terdahulu | Indikator terkait |
|---|---|---|---|
| 1. Orientasi pada capaian kegiatan | Van Meter & Van Horn (1975): standar dan ukuran kinerja | Evaluasi relawan berbasis laporan kegiatan dan sertifikat (Hambali et al., 2020); efisiensi dinilai dari rasio input dan angka partisipasi (Marshalena et al., 2025) | Outcome 1 dan 2 |
| 2. Komunikasi kurang interaktif | Edwards III (1980): komunikasi dan disposisi pelaksana | Pembekalan relawan hanya sekali sehingga pemahaman materi teknis kurang (Hambali et al., 2020); sosialisasi dirasa belum menyentuh aspek personal (Marshalena et al., 2025) | Outcome 1 |
| 3. Sasaran belum berbasis data | Grindle (1980): konteks dan kelompok terdampak | Tidak ada materi khusus segmen (Hambali et al., 2020); kurang segmentasi (Marshalena et al., 2025); selisih partisipasi menurut jenis kelamin (Tabel 2) | Output 1 |
| 4. Program bersifat musiman | Van Meter & Van Horn (1975): sumber daya dan | Kegiatan relawan sekitar dua bulan dan tidak merata (Hambali et al., | Output 2; tindak lanjut Outcome 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | lingkungan; Grindle (1980): kapasitas | 2020); sosialisasi terkonsentrasi Agustus sampai November (Marshalena et al., 2025); rekomendasi keberlanjutan (Sari et al., 2025) | |
| 5. Tidak ada pengukuran sebelum dan sesudah | Van Meter & Van Horn (1975); Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006): tingkat pembelajaran | Evaluasi pada laporan kegiatan (Hambali et al., 2020); preseden pemisahan output dan outcome (Sunarsih, 2018); evaluasi terukur (Sari et al., 2025) | Outcome 1 |

Orientasi pada capaian kegiatan. Jika standar keberhasilan menekankan jumlah acara dan peserta, organisasi cenderung berfokus pada pelaksanaan aktivitas, sejalan dengan perhatian Van Meter dan Van Horn (1975) terhadap kejelasan ukuran kinerja. Pola ini tampak pada penelitian terdahulu. Evaluasi relawan demokrasi di Pekanbaru dan Dumai dilakukan terhadap laporan kegiatan dan diakhiri pemberian sertifikat, sementara keberhasilan disimpulkan dari tingginya partisipasi perempuan pada Pemilu 2019 (Hambali et al., 2020). Penalaran ini rentan karena angka partisipasi dipengaruhi banyak faktor di luar program. Angka partisipasi Kota Pekanbaru pada Pemilu 2019 yang dikutip studi tersebut, sekitar 93,97%, berasal dari pemilu serentak nasional dan tidak sebanding langsung dengan Pilwako 2024 yang 46,12%. Bila angka agregat menjadi satu-satunya ukuran, kesimpulan tentang program dapat berbalik tanpa informasi apa pun tentang perubahan pada program itu sendiri.

Komunikasi yang kurang interaktif. Penyampaian satu arah dapat menjangkau banyak orang tetapi belum tentu memastikan pemahaman. Kerangka Edwards III (1980) membantu menilai mutu komunikasi dan kesiapan pelaksana. Di Pekanbaru dan Dumai, pembekalan relawan hanya dilakukan sekali bersamaan dengan pelantikan sehingga sebagian relawan kurang menguasai materi teknis kepemiluan (Hambali et al., 2020). Di Sidoarjo, sosialisasi dinilai belum cukup menyentuh aspek emosional dan personal pemilih serta kurang inovatif dalam penyampaian pesan (Marshalena et al., 2025). Bukti internasional sejalan dengan hal ini: kontak personal tatap muka lebih berpengaruh daripada pesan massal (Gerber & Green, 2000), meskipun konteksnya berbeda.

Sasaran belum cukup berbasis data. Kelompok yang mudah dijangkau belum tentu yang paling membutuhkan. Kerangka Grindle (1980) mengarahkan perhatian pada konteks dan kelompok terdampak. Di Pekanbaru, partisipasi perempuan 7,54 poin lebih tinggi daripada laki-laki (Tabel 2), partisipasi pemilih pemula menurun dari 66,5% menjadi 53,6% (Maulana, 2025), dan pola partisipasi penyandang disabilitas berubah tajam antartahun (Abda, 2025). Segmentasi pesan juga belum optimal. Relawan basis perempuan tidak menerima materi khusus bagi komunitas sasarannya (Hambali et al., 2020), dan sosialisasi di Sidoarjo cenderung bersifat umum (Marshalena et al., 2025).

Sari et al. (2025) menempatkan pendidikan pemilih yang tersegmentasi sebagai komponen strategi peningkatan partisipasi.

Program bersifat musiman. Pendidikan yang terutama dilakukan menjelang pemilu membatasi pembelajaran berkelanjutan di luar masa tahapan. Kegiatan relawan demokrasi di Pekanbaru dan Dumai berlangsung sekitar dua bulan, dengan wilayah kerja luas sehingga pelaksanaan tidak merata di kecamatan pinggiran (Hambali et al., 2020). Sosialisasi di Sidoarjo berlangsung terkonsentrasi pada Agustus sampai November 2024 (Marshalena et al., 2025). Sari et al. (2025) merekomendasikan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Tidak ada pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Tanpa baseline, post-test, dan tindak lanjut, perubahan pengetahuan sulit dibuktikan dan dipakai memperbaiki program. Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006) menempatkan pembelajaran sebagai tingkat evaluasi tersendiri yang diukur terpisah dari reaksi peserta dan hasil akhir. Preseden evaluasi yang memisahkan output dan outcome ada pada tingkat KPU kabupaten (Sunarsih, 2018), dan Sari et al. (2025) merumuskan kolaborasi berbasis evaluasi terukur. Namun pada studi Pekanbaru yang ditelaah, evaluasi masih bertumpu pada laporan kegiatan dan angka agregat.

**Tabel 6. Indikator output dan outcome yang diusulkan**

| Jenis | Indikator | Definisi operasional dan cara mengukur | Sumber data |
|---|---|---|---|
| Output 1 | Jangkauan segmen prioritas | Persentase kegiatan yang menjangkau kelompok sasaran yang ditetapkan: (kegiatan yang menjangkau segmen prioritas ÷ total kegiatan) × 100%. Definisi kelompok dan denominator ditetapkan lebih dulu. | Laporan kegiatan; daftar hadir dengan kode segmen |
| Output 2 | Peserta unik yang mengikuti kegiatan sampai selesai | Peserta dihitung tanpa duplikasi, dan penyelesaian kegiatan dicatat: (peserta unik yang tuntas ÷ peserta unik terdaftar) × 100%, bukan sekadar daftar hadir. | Daftar hadir ber-identitas; catatan penyelesaian kegiatan |
| Outcome 1 | Perubahan skor pre-test dan post-test | Selisih skor pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah kegiatan; tindak lanjut 1 sampai 3 bulan menguji daya ingat. | Instrumen pre-post (Tabel 7) |
| Outcome 2 | Partisipasi dan proporsi suara | Membandingkan data wilayah atau kelompok pada pemilu | Rekapitulasi KPU per |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tidak sah di wilayah sasaran | yang sebanding, mempertimbangkan faktor lain. | sambil kecamatan atau kelurahan |

Outcome 2 harus ditafsirkan hati-hati karena partisipasi dan suara tidak sah dipengaruhi faktor di luar program, termasuk jenis pemilu, kontestasi, dan kelelahan pemilih. Hasilnya lebih tepat dibaca sebagai indikasi kontribusi program, bukan bukti sebab tunggal. Karena itu, pembandingan hanya layak dilakukan pada jenis pemilu yang sebanding, misalnya Pilwako dengan Pilwako.

**Instrumen Pengukuran**

Perubahan pengetahuan dan sikap (Outcome 1) diukur dengan instrumen pre-test dan post-test. Tabel 7 memberi contoh butir yang dapat disesuaikan dengan materi kegiatan.

**Tabel 7. Contoh instrumen pre-test dan post-test**

| Aspek | Contoh butir | Bentuk jawaban |
|---|---|---|
| Pengetahuan | Bagaimana cara memastikan nama terdaftar sebagai pemilih? | Benar/salah atau pilihan ganda |
| Pengetahuan | Tahapan pemilu apa yang paling dekat dengan responden? | Pilihan ganda |
| Literasi informasi | Apa yang perlu dilakukan sebelum membagikan kabar tentang pemilu? | Pilihan ganda |
| Sikap dan kesiapan | Seberapa yakin responden bahwa satu suara berarti dan siap menggunakan hak pilih secara mandiri? | Skala Likert 1 sampai 5 |

Instrumen diberikan sebelum dan sesudah kegiatan, lalu dapat diulang 1 sampai 3 bulan kemudian. Butir disesuaikan dengan materi yang diberikan dan diuji coba terlebih dahulu. Untuk analisis, skor sebelum dan sesudah pada peserta yang sama dapat dibandingkan dengan uji beda berpasangan atau, bila sebaran data tidak normal, uji peringkat bertanda Wilcoxon. Besarnya peningkatan dapat dinyatakan dengan normalized gain, yaitu selisih skor post dan pre dibagi selisih skor maksimum dan pre (Hake, 1998), sehingga peningkatan antarkelompok dengan skor awal berbeda dapat dibandingkan secara lebih adil.

**Rekomendasi Perbaikan**

1. Menetapkan sasaran berbasis data. Gunakan data partisipasi per kecamatan atau kelurahan dan informasi kelompok sasaran yang telah diverifikasi terhadap rekapitulasi resmi. Perbedaan menurut jenis kelamin menjadi petunjuk awal, bukan kesimpulan tentang penyebab.
2. Memindahkan sebagian ukuran keberhasilan ke outcome. Rencana kerja dan laporan evaluasi memuat indikator perubahan pengetahuan dan sikap, di samping jumlah kegiatan dan peserta.
3. Melaksanakan pre-test dan post-test mulai dari kegiatan strategis, disertai tindak lanjut, dan memakai hasilnya untuk memperbaiki materi dan metode.
4. Memvariasikan pendekatan dan menguatkan kapasitas pelaksana. Metode interaktif dan digital untuk pemilih muda, pendekatan komunitas bagi kelompok

sulit dijangkau, materi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta pembekalan berulang dan materi khusus segmen bagi relawan demokrasi.
5. Menjaga keberlanjutan melalui edukasi ringan di luar masa tahapan pemilu.
6. Memanfaatkan hasil evaluasi dalam rapat perencanaan berikutnya dan mendokumentasikan tindak lanjutnya.

**Keterbatasan**

Artikel ini berbasis dokumen sekunder tanpa data primer. Data jumlah kegiatan, peserta, sasaran, dan anggaran program KPU Kota Pekanbaru belum tersedia, angka suara tidak sah Pilwako 2024 tingkat kota belum diperoleh, dan sebagian data pembanding berasal dari skripsi, prosiding, dan pemberitaan yang perlu diverifikasi terhadap sumber resmi sebelum dipublikasikan. Penelusuran penelitian terdahulu bersifat purposif, dan beberapa angka antarsumber tidak seragam, misalnya jumlah pemilih disabilitas. Perbandingan lintas daerah, seperti Sidoarjo, bersifat ilustratif karena konteks dan jenis pemilihannya berbeda.

## SIMPULAN

Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kota Pekanbaru memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipetakan melalui logic model dari masalah hingga outcome. Tantangan evaluasi utamanya adalah risiko kesenjangan antara output dan outcome, yang bersumber dari orientasi pada capaian kegiatan, komunikasi yang kurang interaktif, sasaran yang belum berbasis data, pelaksanaan yang musiman, dan ketiadaan pengukuran sebelum-sesudah. Kelima risiko ini konsisten dengan pola yang dilaporkan penelitian terdahulu di Pekanbaru, Dumai, dan Sidoarjo. Partisipasi Pilwako 2024 sebesar 46,12% (perempuan 49,83%, laki-laki 42,29%), yang lebih rendah daripada 2017 dan searah dengan tren penurunan nasional, penting sebagai konteks dan baseline, tetapi tidak menjelaskan penyebab ketidakhadiran maupun membuktikan efektivitas program. Empat indikator yang diusulkan dapat memperkuat evaluasi bila didukung definisi operasional dan data yang dapat diverifikasi.

Artikel ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis berupa kerangka kerja evaluasi (evaluation framework) yang menjembatani keterbatasan evaluasi sosialisasi KPU yang selama ini cenderung berfokus pada serapan anggaran dan jumlah peserta. Kelemahan utama kajian ini terletak pada ketiadaan data empiris primer (wawancara mendalam, observasi, dan instrumen tes yang disebar ke pemilih secara langsung). Oleh karena itu, temuan dan risiko yang dirumuskan merupakan analisis konseptual dan hipotesis kerja. KPU Kota Pekanbaru disarankan untuk mengadopsi indikator outcome dan instrumen pre-post test yang dirumuskan dalam studi ini pada siklus pemilihan berikutnya. Bagi peneliti selanjutnya, naskah ini menyediakan dasar metodologis yang siap diuji secara empiris melalui riset kuantitatif (experimental/quasi-experimental pre-post design) maupun kualitatif lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abda, M. F. (2025). Metode KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024. JOM FISIP, 12(2).

Universitas Riau. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/36408/34664

Andriani, F. (t.t.). Strategi KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pilwako tahun 2017. Jurnal Nusantara. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/950

ANTARA. (2024). KPU Singkawang: Partisipasi pemilih di Pilkada 2024 menurun. https://kalbar.antaranews.com/berita/616698/kpu-singkawang-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024-menurun

Bisnis.com. (2024, 29 November). KPU ungkap partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ada di bawah 70 persen. https://kabar24.bisnis.com/read/20241129/15/1820334/kpu-ungkap-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024-ada-di-bawah-70-persen

Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models. Jossey-Bass.

Gerber, A. S., & Green, D. P. (2000). The effects of canvassing, telephone calls, and direct mail on voter turnout: A field experiment. American Political Science Review, 94(3), 653–663.

Grindle, M. S. (Ed.). (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64–74.

Hambali, Hariyanti, Eddison, A., & Salmawati. (2020). Pelaksanaan program relawan demokrasi basis perempuan sebagai fasilitator pendidikan pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan (hlm. 37–42). Universitas Ahmad Dahlan. https://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/download/3658/pdf

InfoPublik. (2024). Abdul Wahid-SF Hariyanto raih kemenangan di Pilkada Riau 2024. https://infopublik.id/kategori/nusantara/891708/abdul-wahid-sf-hariyanto-raih-kemenangan-di-pilkada-riau-2024

Jurnal KPU. (t.t.). Kajian partisipasi pemilih dan surat suara tidak sah di Provinsi Riau. Electoral Research and Education. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/38/19

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating training programs: The four levels (3rd ed.). Berrett-Koehler.

Komisi Pemilihan Umum. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan. KPU.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. (2024). Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. KPU Kota Pekanbaru.

Lestari, F. (2026). Analisis peranan KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota tahun 2024 (studi kasus Kecamatan Payung Sekaki) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/96158/

Marshalena, J. A., Alya, A. P., Wijaya, S. K., Angelia, M. D., & Manggalou, S. (2025). Evaluasi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih tahun 2024. Indonesian Research Journal on Education, 5(4), 519–526. https://irje.org/irje/article/download/2847/1938

Maulana, K. T. (2025). Partisipasi pemilih pemula pada pileg dan pilpres di Kota Pekanbaru tahun 2024 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/91284/

Moad, & Yeswanto. (2018). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 283–291. https://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/download/758/680/2832

Nabil, D. H. (2025). Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Pemilu 2024. JOM FISIP, 12(1). Universitas Riau. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/36277/34557

Niemi, R. G., & Junn, J. (1998). Civic education: What makes students learn. Yale University Press.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation. University of California Press.

Purba, A. P. N. (2023). Peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/73057/

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Repositori UIN Suska. (t.t.). Fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 [Skripsi]. https://repository.uin-suska.ac.id/13618/

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A systematic approach (7th ed.). Sage Publications.

Sari, S. D. N. I., Shodikin, A., & Hanafi, S. (2025). Strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi golput dalam pemilihan kepala daerah. PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 3(2). https://journal2.uinssc.ac.id/index.php/pepakem/article/download/602/225/2215

Sunarsih. (2018). Evaluasi program pilot project desa melek politik KPU Kabupaten Sleman [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/166585

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

W.K. Kellogg Foundation. (2004). Logic model development guide. W.K. Kellogg Foundation.

Weiss, C. H. (1998). Evaluation: Methods for studying programs and policies (2nd ed.). Prentice Hall.